



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PERCEPATAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS: TANTANGAN PENDANAAN DAN IMPLEMENTASI

Yiyis Aldi Mebra

Analisis Legislatif Ahli Pertama
yiyis.mebra@dpr.go.id

Ariesy Tri Mauleny

Analisis Legislatif Ahli Madya
ariesy.mauleny@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memerlukan perhatian dalam aspek pendanaan dan implementasi. Awalnya program ini dianggarkan sebesar Rp71 triliun dengan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang pada akhir tahun 2025. Namun, Presiden menghendaki percepatan pencapaian target menjadi September 2025, yang berdampak pada penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun sehingga total anggaran dibutuhkan mencapai Rp171 triliun.

Keputusan penambahan anggaran ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara BRI Microfinance Outlook di Tangerang pada 30 Januari 2025. Untuk mengakomodasi kebutuhan anggaran tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian dan efisiensi terhadap belanja negara tahun 2025 yang direncanakan mencapai lebih dari Rp3.600 triliun berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Efisiensi dilakukan dengan memangkas pos belanja yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, sementara program dan proyek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diprioritaskan.

Program MBG dinilai sebagai investasi jangka panjang yang bertujuan menjamin anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk menunjang kegiatan belajar. Selain manfaat langsung bagi penerima program, MBG juga diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian nasional, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini akan melibatkan berbagai sektor mulai dari produksi bahan pangan, distribusi, hingga tenaga kerja di bidang kuliner dan logistik.

Implementasi program MBG membutuhkan persiapan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak. Peran UMKM dalam program ini sangat strategis, mengingat kebutuhan penyediaan makanan bergizi dalam skala besar akan membuka peluang usaha baru di berbagai daerah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pemberdayaan UMKM.

Untuk mendukung implementasi program, Kementerian Keuangan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), mendorong lembaga keuangan untuk berpartisipasi melalui penyediaan akses kredit bagi perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan MBG. Hal ini dimaksudkan untuk membantu perusahaan memenuhi kebutuhan modal kerja dan produksi, terutama bagi yang telah mendapatkan *purchasing order* dalam program MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga menegaskan bahwa penambahan anggaran merupakan konsekuensi logis dari percepatan implementasi program yang diinginkan Presiden. Koordinasi antar kementerian dan lembaga terus dilakukan untuk menyesuaikan program dan menjamin MBG berjalan dengan baik, menciptakan pemerataan, serta memiliki tata kelola yang kuat.

Percepatan implementasi program MBG memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat membantu mengidentifikasi dan memverifikasi penerima manfaat, serta memastikan kesiapan infrastruktur pendukung program di wilayahnya masing-masing. Selain itu, peran aktif masyarakat dan pelaku usaha lokal juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program dan pemerataan manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari tercapainya target penerima manfaat, tetapi juga dari dampak positifnya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas program dan mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan dalam implementasinya, serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional.

Atensi DPR

DPR RI, khususnya Komisi XI, perlu mengambil langkah strategis dalam mengawal implementasi Program MBG. Melalui fungsi pengawasan, Komisi XI DPR RI perlu menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Keuangan, OJK, dan BI untuk memastikan efektivitas penyaluran tambahan anggaran serta skema pembiayaan yang mendukung program. Selain itu, DPR RI perlu mendorong penguatan koordinasi antar kementerian/lembaga untuk menjamin tata kelola program yang baik dan tepat sasaran, disamping mencermati efektivitas efisiensi belanja yang dilakukan. DPR RI juga perlu memastikan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengawasi implementasi program di tingkat daerah, serta mendorong pemerintah untuk menyusun petunjuk teknis yang jelas terkait pelaksanaan program agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Sumber

emitennews.com, 31 Januari 2025;
gemapos.id, 31 Januari 2025;
kemenkeu.go.id, 31 Januari 2025;
tempo.co, 31 Januari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Fauzan Lazuardi R.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*